

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

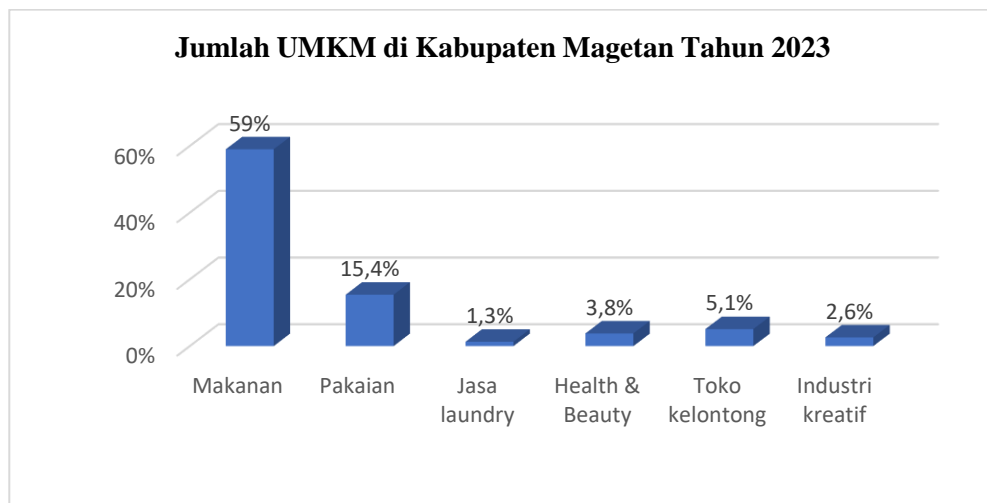
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pandemi ini menyebabkan penutupan sejumlah perusahaan yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran. Dengan adanya pengangguran, mendorong banyak orang untuk mencari alternatif pekerjaan yang lebih mandiri dan fleksibel, maka banyak orang yang membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara berkembang di Asia yang pernah menghadapi krisis moneter pada tahun 1998, namun sektor yang tetap bertahan saat itu adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Rahayu & Musdholifah, 2017).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) (2023), pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta dengan kontribusi sebesar 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp. 9,8 triliun dan menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Dengan menyerap banyak tenaga kerja, UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan ekonomi daerah. Menurut Dessyarti *et al.* (2023), selain berperan positif dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi dalam distribusi hasil-hasil pembangunan, sehingga dapat membantu mewujudkan pemerataan hasil

pembangunan ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan (2023), jumlah UMKM di wilayah ini mencapai lebih dari 155 ribu unit usaha, yang menyerap lebih dari 60% tenaga kerja lokal, namun banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan yang menghambat dan keberlanjutan usaha mereka (www.dinkopum.magetan.go.id). Menurut Rita & Utomo (2019), kinerja UMKM adalah kemampuan usaha untuk mencapai tujuan finansial dan operasional, seperti peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, pertumbuhan pasar, dan kemampuan berinovasi. Menurut Setyawati & Sudarmiatin (2023), kinerja UMKM tidak hanya sekedar mencerminkan pencapaian finansial, namun juga menggambarkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola operasional secara efisien, menghadapi tantangan pasar yang ada, dan mendorong adanya sebuah inovasi.

Menurut Onyiego *et al.* (2017), di Kenya UMKM telah menjadi penopang perekonomian, namun pada saat yang sama mereka terus menghadapi kendala yang membatasi perkembangan dan kinerja keuangan tersebut. Menurut Evangeulista *et al.* (2023), efisiensi operasional yang tinggi menggambarkan kemampuan UMKM dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan biaya produksi yang kompetitif. Di Kabupaten Magetan, UMKM tidak hanya mencerminkan beragamnya sektor ekonomi lokal, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kinerja ekonomi dan sosial, seperti produk kerajinan kulit yang dihasilkan, terutama sepatu dan tas.

Menurut Latifah *et al.* (2021), UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal melalui produksi barang dan jasa. Adapun keberagaman UMKM di Kabupaten Magetan terlihat dalam gambar grafik di bawah ini:

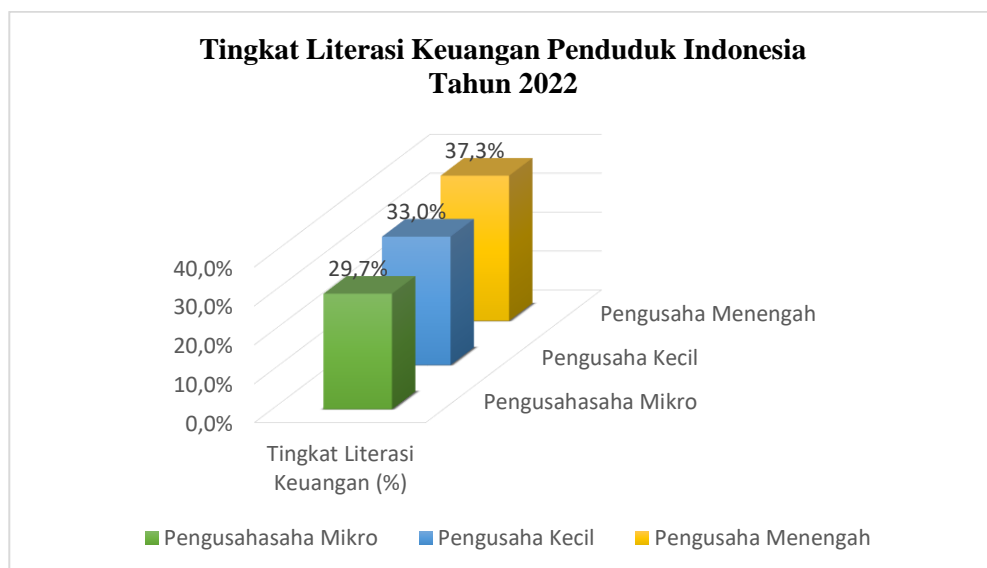


Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Sumber: www.dinkopum.magetan.co.id, data diolah 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan (2023), tersebut mengenai pelaku usaha, sebagian besar (59%) bergerak dalam bidang penjualan makanan dan minuman, menunjukkan dominasi sektor ini di antara mereka. Sekitar 15.4% terlibat dalam industri pakaian, mencerminkan minat yang signifikan dalam *fashion* dan pakaian serta sisanya berpartisipasi dalam berbagai sektor lain yang menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi di antara pelaku usaha. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih minim dalam pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan, yang dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Menurut Cahyawati *et al.* (2023), literasi keuangan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Menurut Desmiyawati *et al.* (2023), Literasi keuangan mencakup pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan investasi yang bijak. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa *et al.* (2024), menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki korelasi positif dengan kinerja usaha kecil. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (2022), tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia terutama pada pelaku UMKM masih tergolong rendah. Adapun data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.2 Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia Tahun 2022.

Sumber: www.ojk.go.id, data diolah 2024.

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan persentase tingkat literasi pengusaha mikro yang paling rendah, yaitu sebesar 29,7%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak UMKM masih belum sepenuhnya memahami konsep dasar keuangan yang penting untuk pengelolaan usaha mereka. Menurut Fornero & Monticone (2011), sebagian besar individu kurang memiliki pengetahuan tentang konsep dasar keuangan, meskipun mereka lebih akrab dengan inflasi dan saham dibandingkan dengan bunga majemuk. Mirip dengan temuan di negara-negara lain, masyarakat berpendidikan rendah menunjukkan kinerja yang buruk. Misalnya di Jepang dengan tingkat literasi keuangan rendah, hanya 49% yang paham tentang bunga dan inflasi (Sarpong, 2023). Kekurangan pengetahuan ini sering menyebabkan kesalahan dalam mengelola keuangan. Kesalahan-kesalahan ini bisa berdampak buruk pada kinerja usaha, karena keputusan keuangan yang kurang tepat bisa membuat usaha mengalami kerugian atau kesulitan berkembang.

Tanpa pengetahuan yang memadai tentang cara mengelola arus kas, pemilik UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, yang dapat menyebabkan masalah likuiditas (Fasya *et al.*, 2024). Menurut Setyawati & Sudarmiatin (2023), kurangnya kemampuan untuk merencanakan anggaran dengan tepat dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kesulitan dalam menabung untuk investasi masa depan. Banyak pelaku UMKM mencampurkan pendapatan usaha dengan pendapatan pribadi, yang sering menyebabkan kebingungan dalam mengelola keuangan usaha. Masalah ini semakin diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan, yang berkaitan erat dengan kurangnya pelatihan dan edukasi yang memadai bagi pemilik UMKM.

Menurut Anisa & Nahda (2023), banyak pelaku UMKM memulai bisnis dengan modal pengalaman dan intuisi tanpa memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang keuangan. Oleh karena itu, program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk membekali pelaku usaha dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Menurut Grohmann *et al.* (2017), literasi keuangan mempengaruhi akses dan penggunaan layanan keuangan secara berbeda tergantung pada tingkat pengetahuan finansial seseorang. Literasi keuangan membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan dengan lebih baik dan efisien.

Tidak hanya literasi keuangan yang menjadi tantangan, tetapi juga inklusi keuangan yang merupakan faktor krusial dalam mendukung kinerja UMKM. Tingkat persentase aspek-aspek pada inklusi keuangan pelaku penduduk di Indonesia sangatlah beragam. Menurut data dari OJK (2023), rata-rata tingkat inklusi keuangan di Indonesia sebagai berikut:



Gambar 1.3 Tingkat Inklusi Keuangan Penduduk Indonesia Tahun 2022.

Sumber: www.ojk.go.id, data diolah 2024.

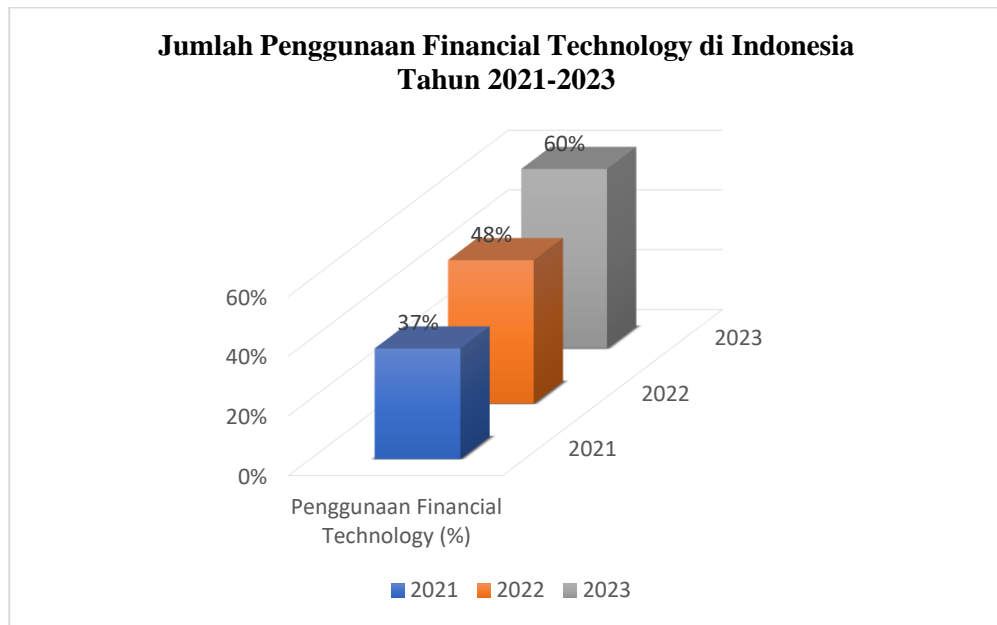
Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan penduduk Indonesia menunjukkan bahwa 51% populasi memiliki akses ke layanan keuangan formal, tetapi hanya 32% yang menggunakannya secara aktif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akses dan pemanfaatan layanan keuangan, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan atau kepercayaan terhadap sistem keuangan. Selain itu, hanya 17% dari populasi yang merasa puas dengan kualitas layanan keuangan yang diterima, menandakan perlunya peningkatan kualitas untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih efektif dan komprehensif. Menurut Irman *et al.* (2021), inklusi keuangan mengacu pada akses yang luas terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, seperti rekening bank, kredit, asuransi, dan instrumen keuangan lainnya. Namun, di Kabupaten Magetan, masih banyak UMKM yang belum terintegrasi dalam sistem keuangan formal.

Menurut *World Bank* (2021), hanya sekitar 55% UMKM di beberapa daerah yang memiliki akses ke kredit perbankan formal. Keterbatasan akses ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses geografis, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya informasi mengenai produk keuangan yang tersedia. Menurut Durai & Stela (2019), akibat dari keterbatasan akses ini, banyak UMKM di daerah ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka. Menurut Gustriani *et al.* (2023), tanpa akses ke kredit yang terjangkau, UMKM mungkin tidak dapat melakukan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas pasar mereka.

Tanpa adanya akses ke layanan asuransi, UMKM rentan terhadap risiko bisnis yang dapat merusak stabilitas keuangan mereka. Permasalahan ini mencerminkan perlunya inovasi dan adaptasi dari lembaga keuangan formal dalam menjangkau UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil. Lembaga keuangan perlu menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM, seperti kredit mikro dengan prosedur yang lebih mudah dan biaya yang lebih terjangkau (Irman *et al.*, 2021). Menurut Wardi *et al.* (2020), penting bagi lembaga keuangan untuk melakukan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan dan pentingnya asuransi, agar mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan produk-produk keuangan yang ditawarkan. Untuk itu, diharapkan UMKM dapat bersaing, serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak solusi potensial untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Menurut Chinoda & Kapingura (2023), inklusi keuangan mencakup penggunaan teknologi seperti *mobile banking* dan pembayaran digital yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Teknologi juga banyak digunakan untuk mempermudah pengelolaan finansial. Menurut Pentury (2023), *Fintech* mencakup penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, hingga manajemen investasi dan asuransi.

Sesuai data yang diperoleh dari OJK (2023), penggunaan *financial technology* terus mengalami kenaikan. Hal ini tercatat dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1.4 Jumlah Penggunaan *Financial Technology* di Indonesia Tahun 2021-2023.
Sumber: www.ojk.go.id, data diolah 2024.

Berdasarkan data pada grafik di atas, diketahui bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, penggunaan *fintech* di kalangan pelaku UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan. Pada 2021, sekitar 37% UMKM memanfaatkan layanan *fintech*, yang naik menjadi 48% pada 2022, dan mencapai 60% pada 2023. Menurut laporan Asosiasi *Fintech* Indonesia (2023), menunjukkan bahwa 62% penyelenggara *fintech* mengklaim telah melayani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari jumlah itu, 42% *fintech* menyatakan nilai transaksi dari UMKM telah lebih dari Rp. 80 miliar (www.databoks.katadata.co.id).

Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya adopsi teknologi keuangan oleh UMKM, didorong oleh kemudahan akses layanan serta kebutuhan akan solusi keuangan yang efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerja usaha dan secara keseluruhan memperkuat inklusi keuangan pada UMKM. (Fadhillah *et al.*, 2023). Penggunaan *fintech* oleh UMKM dapat membuka peluang baru untuk memperoleh pembiayaan, transaksi keuangan dengan lebih cepat dan murah, serta meningkatkan efisiensi operasional (Putri *et al.*, 2023). Menurut data dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (2023), sekitar 30% UMKM di Indonesia telah menggunakan layanan *fintech* untuk transaksi keuangan. Platform *fintech* dapat menyediakan layanan pinjaman *peer-to-peer* yang memungkinkan UMKM mendapatkan dana dari investor tanpa melalui prosedur rumit lembaga keuangan tradisional.

Menurut Utami (2022), tingkat penggunaan *fintech* di kalangan UMKM masih bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran, keterampilan teknologi, dan kepercayaan terhadap sistem digital. Menurut Nurhayani *et al.* (2024), beberapa pemilik UMKM masih ragu untuk menggunakan teknologi baru karena kekhawatiran tentang keamanan data atau kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan *platform* tersebut secara efektif. Pemanfaatan *fintech* juga menawarkan solusi bagi beberapa kendala geografis dan birokratis yang sering dihadapi oleh UMKM di daerah terpencil. Dengan teknologi digital, layanan keuangan dapat diakses kapan saja dan dimana saja, tanpa perlu mendatangi kantor cabang secara langsung (Mention, 2021).

Menurut Amnas & Selvam (2024), mengetahui cara menangani keuangan digital sangatlah penting untuk memanfaatkan layanan *fintech* secara maksimal. Dengan kata lain, di era kemajuan teknologi yang pesat ini, meleak digital adalah suatu keharusan untuk menghasilkan uang yang cerdas dan menjadi bagian dari sistem keuangan formal. UMKM di Kabupaten Magetan, yang mungkin sulit mengakses lembaga keuangan tradisional, sangat diuntungkan dengan adanya teknologi digital untuk mengelola keuangan dan mendapatkan layanan keuangan. Menurut Mir & Bushra (2024), di era digital perlu memiliki pengetahuan agar dapat mengambil keputusan yang sejalan dengan tujuan finansial mereka, terutama ketika kemajuan *fintech* memunculkan opsi kredit baru. Hal ini menekankan betapa pentingnya literasi keuangan digital untuk mendorong pengelolaan kredit yang tepat dan menjamin keamanan finansial dalam lingkungan keuangan yang dinamis.

Tidak hanya manfaat *fintech* juga membawa tantangan baru yang harus dihadapi oleh UMKM, seperti risiko keamanan *cyber* dan kebutuhan akan literasi digital yang memadai. Menurut Anisa & Nahda (2023), penggunaan teknologi digital dalam keuangan tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang produk keuangan, tetapi juga keterampilan dalam menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pemilik UMKM sangat penting. Program pelatihan dan dukungan teknis yang ditawarkan oleh pemerintah atau organisasi *non-profit* dapat membantu pemilik UMKM untuk lebih percaya diri dan terampil dalam menggunakan teknologi *fintech*.

Menurut Lontchi *et al.* (2023), UMKM di Kamerun secara signifikan meningkatkan kinerja mereka melalui literasi keuangan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi saluran penting di mana teknologi keuangan dapat memicu peningkatan kinerja UMKM. Penelitian yang sama dilakukan oleh Rita & Utomo (2019), Gunawan (2023), Anisa & Nahda (2023), Cahyawati *et al.* (2023), menemukan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *financial technology* secara umum memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM. Namun, menurut penelitian yang dilakukan Latifah *et al.* (2021), menemukan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Batu Malang. Sementara itu, Widiyati *et al.* (2018), dalam penelitiannya juga menemukan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM di Purworejo.

Di sisi lain, Anthanasius & Opperman (2023), dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan *financial technology* berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM di Kota Probolinggo. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, menunjukkan bahwa temuan-temuan dari para peneliti berbeda satu sama lainnya, maka dari itu judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan *Financial Technology (FinTech)* Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Magetan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Magetan?
2. Apakah inklusi keuangan berdampak pada kinerja UMKM di Kabupaten Magetan?
3. Apakah *financial technology* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Magetan?
4. Apakah literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *financial technology* secara simultan mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kab. Magetan.
2. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kab. Magetan.
3. Mengetahui pengaruh *financial technology* terhadap kinerja UMKM di Kab. Magetan.
4. Mengetahui pengaruh simultan antara literasi keuangan, inklusi keuangan, *financial technology* terhadap kinerja UMKM di Kab. Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur akademis mengenai pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *financial technology (fintech)* terhadap kinerja UMKM. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan UMKM.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan anggaran, manajemen arus kas, dan pengambilan keputusan investasi yang bijak.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti program peningkatan literasi keuangan, perluasan layanan keuangan, dan promosi teknologi keuangan.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat mendorong kolaborasi antara peneliti dari berbagai disiplin ilmu, seperti manajemen, ekonomi, dan teknologi, dalam mengkaji dan mengembangkan solusi yang lebih inovatif untuk meningkatkan kinerja UMKM.